

## Pendampingan Teknis Dalam Identifikasi dan Perencanaan Infrastruktur Permukiman Kumuh di Kelurahan Abeli Kota Kendari

Ishak Kadir<sup>\*1</sup>, Annas Ma'ruf<sup>2</sup>, Abdul Kadir<sup>3</sup>, Burhan Said<sup>4</sup>, Muhammad Zakaria Umar<sup>5</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Halu Oleo

<sup>2</sup>Program Studi, Fakultas Teknik, Universitas Halu Oleo

<sup>3</sup>Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Halu Oleo

<sup>\*4</sup>Jurusan Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Halu Oleo

<sup>\*5</sup>Jurusan Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Halu Oleo

Email: <sup>\*1</sup> ishakkadir@uho.ac.id

### Abstrak

Kelurahan Abeli Kota Kendari merupakan salah satu kelurahan yang memiliki kawasan kumuh seluas 3,5 Ha yang terletak di RT 3 dan RT 5. Karakteristik kekumuhan di Kelurahan Abeli meliputi: belum adanya fasilitas drainase dan jalan setapak yang menghubungkan lingkungan, akses air minum masih sulit, belum tertatanya fasilitas pembuangan sampah dan pengolah limbah lingkungan, serta masih banyaknya rumah tinggal masyarakat yang tidak layak huni. Paper ini bertujuan untuk menunjukkan beberapa kegiatan pendampingan teknis bagi masyarakat dalam mengidentifikasi dan merencanakan infrastruktur permukiman mereka. Langkah-langkah yang ditempuh dalam pengabdian ini adalah tahap persiapan, koordinasi dengan kelurahan dan BKM, dan pelaksanaan meliputi pendampingan identifikasi masalah, penyusunan *baseline* RPLP dan DED serta pembangunan infrastruktur. Pengabdian ini disimpulkan bahwa pengetahuan tentang penataan kawasan kumuh meningkat setelah pendampingan teknis. Dengan program penataan kumuh perkotaan, luasan kawasan kumuh di Kelurahan Abeli diharapkan akan berkurang dan menjadi nol kumuh.

**Kata Kunci:** identifikasi, perencanaan, infrastruktur, permukiman kumuh, Abeli

### Abstract

Abeli Village of Kendari City is one of the villages that has a slum area of 3.5 hectares located in RT 3 and RT 5. Slum characteristics in Abeli Village include: lack of drainage facilities and footpaths that connect the environment, access to drinking water is still difficult, the garbage disposal and environmental waste processing facilities are not yet organized, and many unsuitable dwellings of community. This paper aims to show some technical assistance activities for the community in identifying and planning their settlement infrastructure. The steps taken in this service are the preparation phase, coordination with the *kelurahan* and *BKM*, and the implementation includes assistance in identifying problems, preparing RPLP and DED baselines and infrastructure development. This dedication concluded that knowledge about the arrangement of slums increased after technical assistance. With the urban slum structuring program, the area of slums in Abeli is expected to decrease and become zero slums.

**Keywords:** identification, planning, infrastructure, slums, Abeli

## PENDAHULUAN

Perumahan dan permukiman merupakan kebutuhan dasar manusia yang menjadi faktor penting dalam peningkatan harkat dan martabat manusia menuju kehidupan yang sejahtera dalam masyarakat yang adil dan makmur. Selain itu, perumahan dan permukiman juga merupakan bagian dari pembangunan nasional yang perlu terus ditingkatkan dan dikembangkan secara terpadu, terarah, terencana, dan berkesinambungan (Ariyanto, 2015).

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman pasal 1 ayat 13, dijelaskan bahwa permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Dan, perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian. Kawasan kumuh adalah sebuah kawasan dengan tingkat kepadatan populasi tinggi di sebuah kota yang umumnya dihuni oleh masyarakat miskin.

Kawasan kumuh dapat ditemui di berbagai kota besar di Indonesia. Kawasan kumuh umumnya dihubungkan dengan tingkat kemiskinan dan pengangguran tinggi. Kawasan kumuh dapat pula menjadi sumber masalah sosial seperti kejahatan, obat-obat terlarang dan minuman keras. Di berbagai wilayah, kawasan kumuh juga menjadi pusat masalah kesehatan karena kondisinya yang tidak higienis.

Walaupun kawasan kumuh tidak dikehendaki namun harus diakui bahwa keberadaannya dalam perkembangan wilayah dan kota tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, dalam rangka meminimalisir munculnya kawasan kumuh, maka perlu dilakukan upaya-upaya secara komprehensif yang menyangkut berbagai aspek yang mampu menghambat timbulnya atau meluasnya kawasan kumuh tersebut (Rieneke, 2016)

Berbagai macam program pemberdayaan masyarakat telah diluncurkan sejak awal tahun 1990-an hingga akhir tahun 2015. Program-program pemberdayaan tersebut seperti PDMDKE, P2KP, NUSSP, PNPM, PLPBK dan beberapa program lainnya ditujukan untuk penuntasan permasalahan-permasalahan kemiskinan melalui pendekatan tribina, yakni bina ekonomi, bina sosial dan bina lingkungan, adapun sifat program masih bersifat parsial. Saat ini beberapa program tersebut di atas telah bermetamorfosis menjadi sebuah program yang dikenal dengan nama Program KOTAKU (KOta TANpa KUmuh). Sifat program adalah penanganan kumuh wilayah perkotaan dengan skala kawasan yang lebih luas. Program KOTAKU ini merupakan salah satu bentuk implementasi dari program 100-0-100 yang dicanangkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya.

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 mengamanatkan pembangunan dan pengembangan kawasan perkotaan melalui penanganan kualitas lingkungan permukiman yaitu peningkatan kualitas permukiman kumuh, pencegahan tumbuh kembangnya permukiman kumuh baru, dan penghidupan yang berkelanjutan. Pada tahun 2016 masih terdapat 35.291 Ha permukiman kumuh perkotaan yang tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia sesuai hasil perhitungan pengurangan luasan permukiman kumuh perkotaan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya. Kondisi tersebut diperkirakan akan terus mengalami penambahan apabila tidak ada bentuk penanganan yang inovatif, menyeluruh, dan tepat sasaran. Permukiman kumuh masih menjadi tantangan bagi pemerintah kabupaten/kota, karena selain merupakan masalah, di sisi lain ternyata merupakan salah satu pilar penyangga perekonomian kota. Mengingat sifat pekerjaan dan skala pencapaian, diperlukan kolaborasi beberapa pihak antara pemerintah mulai tingkat pusat sampai dengan tingkat kelurahan/desa, pihak swasta, masyarakat, dan pihak terkait lainnya. Pelibatan beberapa pihak secara kolaboratif diharapkan memberikan berbagai dampak positif, antara lain meningkatkan komitmen pemerintah daerah dalam pencapaian kota layak huni, meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat dalam memanfaatkan dan

memelihara hasil pembangunan, menjamin keberlanjutan, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan swasta terhadap Pemerintah.

Masyarakat Kota Kendari sebagaimana masyarakat pada kota-kota lainnya memiliki tipikal lebih ke arah individualistis, sehingga perlu senantiasa diberdayakan melalui program-program pemberdayaan masyarakat semisal program KOTAKU ini. Melalui program-program pemberdayaan masyarakat yang pernah diselenggarakan, maka di tengah-tengah masyarakat lokal telah terbentuk kelembagaan masyarakat pada tingkatan desa maupun kelurahan yang disebut dengan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) yang keanggotaannya terdiri dari para tokoh masyarakat dan dipilih secara terbuka dan memiliki masa kerja tertentu.

Langkah-langkah pendampingan terus dilakukan agar terjadi penguatan kelembagaan pada tingkat masyarakat, sehingga ketika suatu saat program berakhir, maka kelembagaan tersebut tetap hidup dalam penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pembangunan di tingkat lokal. Banyak dari kelembagaan BKM pada tingkat desa/kelurahan yang belum bisa mandiri, meskipun sudah begitu banyak dana-dana pembangunan infrastruktur yang dikelola oleh masyarakat. Hal ini disebabkan oleh rendahnya tingkat partisipasi masyarakat, pergantian keanggotaan BKM, sampai pada pudarnya nilai-nilai kerelawanan di tengah-tengah masyarakat. Oleh sebab itu langkah-langkah pendampingan, dalam rangka memfasilitasi kegiatan-kegiatan pembangunan infrastruktur menjadi sangat penting agar *mainstream* kepemilikan aset setelah dibangun sendiri oleh masyarakat dapat terus dipertahankan, dipelihara dan bahkan kualitas dan kuantitasnya dapat dibangun secara mandiri dan swadaya oleh masyarakat itu sendiri.

Dalam pembuatan dokumen RPLP (Rencana Penataan Lingkungan Permukiman) dan *Detail Engineering Design* (DED), banyak warga masyarakat yang belum memahami konteks dari dokumen-dokumen tersebut. Sementara itu, dokumen RPLP dan DED sendiri merupakan salah satu alat perencanaan pembangunan pada lingkup Kelurahan yang sifatnya teknis dan mengikuti standar-standar baku yang berlaku, sehingga dokumen ini menjadi rujukan resmi dalam hal memulai implementasi pembangunan infrastruktur yang telah direncanakan. Adapun kelurahan yang menjadi target kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah tergolong Kelurahan dengan kondisi Kumuh Berat sesuai dengan SK Walikota Kendari Nomor 386 Tahun 2016 tentang penetapan lokasi kawasan kumuh. Melalui kegiatan pendampingan pengabdian kepada masyarakat ini, diharapkan penanganan kumuh di kelurahan sasaran ini mejadi lebih efektif dan efisien dan tepat sasaran.

Oleh karena itu melalui jalan pengabdian kepada Masyarakat Tim Pengabdian UHO tahun 2017 dan persoalan di atas merupakan tanggung jawab Tim Pengabdian UHO sebagai tenaga edukatif Jurusan Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Halu Oleo. Solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi mitra sebagai berikut: (a) masyarakat diberi penjelasan mengenai cara mengidentifikasi potensi dan permasalahan permukiman kumuh dengan baik, (b) Warga masyarakat Abeli dapat menyusun *Baseline* Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP), menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan mengenali dasar-dasar pembuatan gambar DED dengan menggunakan *Autocad 2* dimensi dan 3 dimensi.

## **METODE PELAKSANAAN**

Langkah-langkah yang ditempuh dalam pengabdian ini adalah tahap persiapan, koordinasi dengan kelurahan dan BKM, dan pelaksanaan meliputi pendampingan identifikasi masalah, penyusunan *baseline* RPLP dan DED serta pembangunan infrastruktur. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan kegiatan ini dapat lebih berkualitas melalui pemberian bekal ilmu ilmu-ilmu keteknikan seperti pengukuran, penggambaran 2 dimensi maupun 3 dimensi, cara perhitungan Rencana Anggaran Biaya, kualitas teknis bahan bangunan, sentuhan estetika dan semacamnya menjadikan perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan menjadi lebih dinamis. Pada tahap akhir setelah pelaksanaan dilakukan evaluasi untuk melihat tanggapan peserta terhadap tingkat kepuasan dan sikap warga dalam kegiatan pendampingan teknis ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Lokasi Kawasan Kumuh Kelurahan Abeli

Kelurahan Abeli Kecamatan Abeli Kota Kendari memiliki 8 (delapan) RT, 4 (Empat) RW. Kelurahan ini terletak di dataran yang memiliki luas wilayah 270,60 Ha dan luas permukiman 122,00 Ha serta luas permukiman non kumuh 110,10 Ha. Letak Kelurahan Abeli berbatasan sebelah Utara dengan Kelurahan Lapulu, sebelah Selatan dengan Kelurahan Benuanirae, sebelah Timur dengan Kelurahan Anggalomelai, dan sebelah Barat dengan Kelurahan Matabubu.



Gambar 1. Peta Lokasi Kawasan Kumuh Kelurahan Abeli

Berdasarkan *Baseline* 100-0-100, saat ini Kelurahan Abeli memiliki kawasan kumuh seluas 8,40 Ha yang tersebar di RT 05, RT 06, RT 07 dan RT 08. Berdasarkan SK Walikota Kendari Nomor 386 Tahun 2016 tentang penetapan lokasi kawasan kumuh, luas kawasan kumuh di Kelurahan Abeli seluas 3,5 Ha yang terletak di RT 03 dan RT 05 (lihat Gambar 1). Jumlah penduduk di kawasan kumuh sebesar 767 jiwa dengan rincian jumlah perempuan sebesar 383 jiwa dan jumlah laki-laki sebesar 384 jiwa. Jumlah Kepala Keluarga sebesar 209 KK, jumlah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sebesar 136 KK dan Non MBR sebesar 51 KK.

Dengan program penataan kumuh perkotaan, luasan kawasan kumuh tersebut diharapkan akan berkurang dan menjadi nol (*zero*) kumuh. Karakteristik kekumuhan di RT 3 dan 5 Kelurahan Abeli meliputi: belum adanya fasilitas drainase, belum terbangunnya jalan setapak yang menghubungkan lingkungan, akses air minum/baku belum seluruhnya terlayani, belum tertatanya fasilitas pembuangan sampah dan pengolah limbah lingkungan, belum adanya prasarana/sarana proteksi kebakaran serta masih banyaknya rumah tinggal masyarakat yang tidak layak huni.

### Pendampingan dalam Identifikasi Permukiman Kumuh

Pendampingan dalam identifikasi permukiman kumuh bertujuan untuk melihat kondisi dan permasalahan kumuh di lokasi sasaran. Lokasi kegiatan terletak di RT 03 dan RT 05 berdasarkan SK Walikota Kendari. Kegiatan identifikasi permukiman dilaksanakan sendiri oleh masyarakat yang dikoordinir oleh anggota kelembagaan BKM Abeli. Hasil identifikasi permukiman kumuh berupa data fisik permukiman seperti: Keteraturan bangunan, kepadatan bangunan, kelayakan fisik bangunan, aksesibilitas lingkungan, drainase lingkungan, pelayanan air minum/baku, pengelolaan air limbah, persampahan dan pengamanan bahaya kebakaran. Data non fisik permukiman seperti: legalitas pendirian bangunan, kepadatan bangunan, mata

pencaharian penduduk, penggunaan daya listrik, fasilitas pelayanan kesehatan, dan fasilitas pelayanan pendidikan. Hasil identifikasi permukiman selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Hasil Identifikasi Permukiman Kumuh Kelurahan Abeli

No.	Kriteria/Indikator	Parameter
A. Fisik		
1.	Keteraturan Bangunan	32 % bangunan tidak memiliki keteraturan
2.	Kepadatan Bangunan	Kawasan permukiman memiliki kepadatan rendah (3 unit/Ha)
3.	Kelayakan Fisik Bangunan	7 % bangunan hunian memiliki luas lantai <7,2 m <sup>2</sup> per org 13% bangunan hunian memiliki kondisi atap, dinding, lantai tidak sesuai persyaratan teknis
4.	Aksesibilitas Lingkungan	18% kawasan permukiman tidak terlayani jaringan jalan lingkungan yang memadai 36 % kondisi jaringan jalan pada kawasan permukiman memiliki kualitas buruk
5.	Drainase Lingkungan	38% kondisi jaringan drainase pada lokasi permukiman
6.	Pelayanan Air Minum/Baku	6% bangunan tidak terlayani jaringan air bersih/baku yg layak
7.	Pengelolaan Air Limbah	4% bangunan hunian tidak memiliki akses jamban/MCK Komunal
8.	Pengelolaan Persampahan	84% Sampah domestik rumah tangga terangkut ke TPS/TPA kurang dari 2 kali seminggu
9.	Pengamanan Bahaya Kebakaran	100% kawasan permukiman tidak memiliki ketersediaan prasarana/sarana proteksi kebakaran
B. Non Fisik		
1.	Legalitas Pendirian Bangunan	96% bangunan hunian tidak memiliki IMB 8% lahan bangunan hunian tidak memiliki SHM/HGB/Surat yang dikauai pemerintah
2.	Kepadatan Penduduk	6 jiwa/Ha
3.	Mata Pencaharian Penduduk	65% mata pencaharian utama rumah tangga adalah perdagangan/jasa (guru, tenaga kesehatan, hotel, dll)
4.	Penggunaan Daya Listrik	41% mayoritas rumah tangga menggunakan daya listrik 900 Watt (unit rumah tangga)
5.	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	96% mayoritas rumah tangga menggunakan fasilitas kesehatan Puskesmas/Pustu (unit rumah tangga)
6.	Fasilitas Pelayanan Pendidikan	58% mayoritas rumah tangga memiliki usia wajib belajar 9 Tahun (SD-SMP) memperoleh akses pendidikan dasar di dalam kelurahan/kecamatan yang sama (unit rumah tangga).

Sumber: Hasil observasi lapangan, 2017

### Pendampingan Penyusunan *Baseline* RPLP dan DED

Kegiatan pendampingan dalam Perencanaan partisipatif berupa pendampingan teknis dalam penyusunan *Baseline* RPLP dan perencanaan DED. Kegiatan berupa Rembug dengan warga masyarakat Kelurahan Abeli yang dilaksanakan pada tanggal 6 November 2017 bertempat di Aula Kantor Kelurahan Abeli. Kegiatan dihadiri oleh warga masyarakat serta ketua dan anggota BKM Abeli. Materi pertemuan rembug warga dapat dilihat pada tabel 4 berikut:

Tabel 2. Materi Rembug Warga Penyusunan *Baseline* RPLP dan DED

No.	Materi	Peserta	Pembicara
1.	Penyusunan <i>Baseline</i> RPLP	Masyarakat/BKM	Ishak Kadir
2.	Perhitungan RAB	Masyarakat/BKM	Abdul Kadir
3.	Penggambaran 2 dan 3 dimensi	Masyarakat/BKM	Annas Ma'ruf
4.	Kualitas teknis bahan bangunan	Masyarakat/BKM	Rini Sriyani

Luaran dari perencanaan partisipatif masyarakat adalah tersusunnya Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) Kelurahan Abeli sebagai acuan untuk melaksanakan kegiatan penataan permukiman khususnya di area kumuh yang telah ditetapkan.



Gambar 2. Kegiatan Rembug Penyusunan *Baseline* RPLP dan DED

Penyusunan *Baseline* Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) mengacu pada data pontesi dan permasalahan permukiman hasil identifikasi permukiman. Perumusan program dalam RPLP didasarkan pada rembug penetapan skala prioritas permasalahan di masing-masing titik area kumuh. Tim Penganbdian UHO memberikan dampingan teknis mengenai bagaimana menyusun skala prioritas dalam menyusun program, tata cara dan metode dalam perhitungan RAB. Setelah itu, bagaimana menuangkan program dan hasil survei dalam bentuk gambar kerja DED sebagai acuan dalam pembangunan fisik infrastruktur. Mengingat keterbatasan waktu Tim, maka pendampingan teknis selanjutnya dilakukan di sela-sela pengerjaan penyusunan RPLP dan DED di sekretariat BKM Abeli.

### **Pendampingan Monitoring dan Pengendalian Pembangunan Infrastruktur**

Tim Pengabdian UHO bersama dengan Tim Fasilitator dan Anggota BKM Abeli juga juga melakukan pendampingan dalam kegiatan monitoring dan pengendalian pembangunan infrastruktur di lokasi kumuh. Kegiatan monitoring dilakukan pada pembangunan infrastruktur drainase jalan lingkungan, jalan setapak yang terbuat dari rabat beton lebar 180 cm. Pekerjaan pembangunan dilaksanakan oleh masyarakat yang dikoordinir oleh anggota Unit Pengelola Lingkungan BKM Abeli.



Gambar 3. Kegiatan Pendampingan dan Monitoring Pembangunan Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur permukiman dibiayai oleh dana dari Program KOTAKU Kota Kendari dan beberapa program pemberdayaan dari berbagai instansi seperti program bedah rumah bagi rumah warga yang tidak layak huni, pembangunan akses jamban/MCK komunal, pembangunan jaringan air bersih/baku, pembangunan TPS dan bak-bak sampah di setiap rumah serta pengolahan air limbah. Banyaknya program pemberdayaan dan pembangunan infrastruktur yang masuk di wilayah Kelurahan Abeli diharapkan dapat mengurangi bahkan menghilangkan kawasan kumuh perkotaan di Abeli dan kelurahan-kelurahan lainnya yang ada di Kota Kendari.

### Sikap Warga dalam Menerima Materi dan Pendampingan Teknis

Tanggapan peserta terhadap tingkat kepuasan sebagai berikut: 1) Jumlah persentase peserta yang puas terhadap waktu pelaksanaan ditanggapi oleh peserta sebesar 95,3%. Jumlah persentase peserta yang menerima dengan sikap biasa terhadap waktu pelaksanaan ditanggapi oleh peserta sebesar 4,7%; 2) Jumlah persentase peserta yang dengan sikap biasa terhadap materi pelaksanaan ditanggapi oleh peserta sebesar 4,7%; 3) Jumlah persentase peserta yang puas terhadap tempat pelaksanaan ditanggapi oleh peserta sebesar 90,5%. Peserta yang menerima dengan sikap biasa terhadap tempat pelaksanaan ditanggapi oleh peserta sebesar 9,5%; 4) Jumlah persentase peserta yang puas terhadap pemateri ditanggapi oleh peserta sebesar 95,3%. Jumlah persentase peserta yang menerima dengan sikap biasa terhadap pemateri ditanggapi oleh peserta sebesar 4,7%; 5) Jumlah persentase peserta yang puas terhadap kegiatan ini ditanggapi oleh peserta sebesar 100% (lihat Tabel 3).

Tabel 3. Tingkat Kepuasan Peserta

No.	Jumlah			Hasil (Dalam Jumlah Persen)		
	Puas	Biasa	Tidak Puas	Puas	Biasa	Tidak Puas
1.	20	1	-	95,3%	4,7%	-
2.	20	1	-	95,3%	4,7%	-
3.	19	2	-	90,5%	9,5%	-
4.	20	1	-	95,3%	4,7%	-
5.	21	21	-	100%	-	-

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis pengabdian ini disimpulkan bahwa dengan kegiatan pendampingan teknis dalam identifikasi dan perencanaan infrastruktur permukiman di Kelurahan Abeli masyarakat telah mampu mengidentifikasi potensi dan permasalahannya sendiri dengan baik sebagai acuan untuk menyusun Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP). Warga masyarakat telah memahami tatacara penyusunan RPLP, pembuatan RAB dan menggambarannya ke dalam gambar kerja *Detail Engineering Desain* (DED). Dengan program penataan kumuh perkotaan, luasan kawasan kumuh tersebut diharapkan akan berkurang dan menjadi nol (*zero*) kumuh.

### Saran

Kegiatan ini diharapkan dapat dilakukan pada setiap kelurahan yang memiliki kawasan kumuh untuk meningkatkan pemahaman masyarakat/BKM dalam penyusunan dokumen baseline RPLP dan *Detail Engineering Desain* yang baik.

**DAFTAR REFERENSI**

- Ariyanto, A. (2015). Strategi Penanganan Kawasan Kumuh Sebagai Upaya Menciptakan Lingkungan Pemukiman Yang Sehat di Kota Pangkajene, Jurnal Perencanaan Wilayah Kota, Unisba Bandung, Volume 2, Halaman 11-37.
- Budiharjo, E. (1982). Tata Ruang Perkotaan. PT Alumni, Bandung.
- Departemen Pekerjaan Umum. (1987). Standar Perencanaan Kota, Departemen Pekerjaan Umum, Bahan Publikasi Khusus mengenai Penanganan Sarana Prasarana Perkotaan.
- Direktorat Jenderal Cipta Karya. (2017). *Strategi Pelaksanaan Program KOTAKU Tahun 2017*, Wilayah-2, Rakor TL & EGM TA NSUP & NUSP-2 Jakarta, 06-09 Januari 2017, Jakarta.
- Direktorat Jenderal Cipta Karya. (2017), *Isu Pelaksanaan Program KOTAKU (NSUP) Tahun 2017*, Jakarta.
- Direktorat Jenderal Cipta Karya. (2017). *Indikator Utama Penanganan Kumuh Program KOTAKU*, Jakarta.
- Kusuma, S., H. (2017). *Continous Quality Improvement*, Jakarta
- Marbun, B., N. (1994). Kota Indonesia Masa Depan: Masalah dan Prospek. Jakarta: Erlangga. 1994. Hal 28.
- Nursyahbani, R., & Bitta, P. (2015). Kajian Karakteristik Kawasan Pemukiman di Kampung Kota, (Studi Kasus: Kampung Gandekan Semarang), Jurnal Teknik PWK, Volume 4 Nomor 2 Tahun 2015.
- Rindroyono. (2013). Pemukiman Kumuh dan Budaya Masyarakat, Jurnal PWK ITB Bandung, Volume 4 Tahun 2013.
- Sela, R. (2016). Perencanaan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan dengan Pendekatan Compact City Strategy Koridor Lintas Tengah di Kabupaten Lampung Tengah, Kertas Kerja dalam Temu Ilmiah IPLBI, Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Sam Ratulangi, Tahun 2016.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.